

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan Pembangunan ekonomi di tingkat kabupaten merupakan fondasi yang utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan juga penyerapan tenaga kerja yang optimal. Dan ketiga faktor ini juga saling berkaitan yang sangat erat, yang dimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga mencerminkan intensitas aktivitas ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengukur kualitas SDM, sedangkan keseimbangan pasar tenaga kerja yang menentukan daya saing wilayah.

Kesejahteraan Tenaga Kerja juga menjadi salah satu perhatian yang cukup umum dalam proses pembangunan ekonomi, terutama di tingkat kabupaten yang langsung bertatap muka dengan kehidupan masyarakat sehari – hari. Para pekerja yang sejahtera juga bukan hanya soal gaji yang cukup, tetapi juga menyangkut dengan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan berkelanjutan. Kesejahteraan tenaga kerja juga yang sesungguhnya adalah ketika seorang pekerja bisa bekerja dengan secara produktif, mendapatkan upah yang juga adil, serta memiliki perlindungan sosial yang juga memadai bagi dirinya dan juga keluarganya. Di Indonesia, juga salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK), yang dimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. UMK inilah yang kemudian digunakan dalam penelitian ini

sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana kesejahteraan tenaga kerja disuatu daerah, khususnya di kabupaten lamongan.

Dan secara teoritis, tingkat kesejahteraan tenaga kerja yang juga tercermin dalam upah yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi makroekonomi yang melingkup. Pada teori pertumbuhan neoklasiknya menjelaskan bahwa ketika perekonomian suatu wilayah tumbuh, produktivitas tenaga kerja akan ikut meningkat, dan pada akhirnya upah pun akan terdorong naik, yang berarti semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka seharusnya semakin baik pula tingkat kesejahteraan para pekerjanya. Dan dalam penelitian ini, grand theory yang digunakan meliputi teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, teori modal manusia sendiri (*Human Capital Theory*) dan teori pasar tenaga kerja, juga menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan juga kesehatan akan meningkatkan produktivitas seseorang, yang kemudian membuat pekerja tersebut mampu mendapatkan upah yang lebih tinggi. Dan sementara dari sisi pasar tenaga kerja juga menjelaskan bahwa tingginya pengangguran juga akan menciptakan banyaknya penawaran tenaga kerja yang tidak terserap, sehingga juga menekan upah ke bawah dan ujungnya juga akan melemahkan kesejahteraan pekerja. Pada faktor pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia melalui IPM, dan kondisi pengangguran melalui TPT, yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini untuk menganalisis kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan.

Kualitas sumber daya manusia juga tidak bisa dilepas dari konsep pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh dengan UNDP melalui *Human Development Report*, pada pembangunan manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga mencakup tiga faktor yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak.

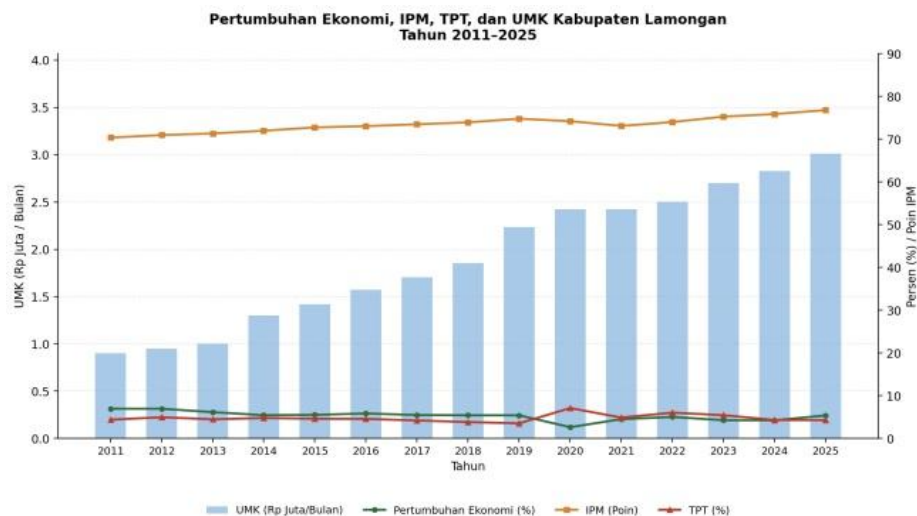
Pada buku *Development as freedom* bahkan menegaskan bahwa kesejahteraan sejati yang bukan hanya soal berapa banyak uang yang dimiliki seseorang, melainkan seberapa luas kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Pada konteks ketenagakerjaan memiliki pendidikan yang lebih baik dan kondisi kesehatan yang bagus dan lebih produktif dan juga lebih mampu menegosiasikan upah yang lebih tinggi di pasar tenaga kerja, dan daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi semestinya juga memiliki tingkat kesejahteraan tenaga kerja yang lebih baik, dan salah satunya dari besarnya UMK .

Dan tidak selalu sejalanannya waktu dan dengan kenyataan di lapangan, terutama di daerah – daerah yang struktur ekonominya yang masih mendominasi sektor informal. Dan di negara berkembang ini juga seperti negara saat ini, kondisi ini juga semakin kompleks bahwa besarnya jumlah tenaga kerja yang informal tidak mendapatkan perlindungan UMK, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga tidak serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara merata.

Di kabupaten Lamongan adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur yang juga dikenal dengan sentra pertanian, khususnya komoditas padi yang juga merupakan penghasil terbesar di Jawa Timur. Pada dekade terakhir daerah Lamongan juga menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup stabil. Dan berdasarkan data BPS Kabupaten Lamongan di tahun 2023, Pertumbuhan Ekonomi Lamongan rata-rata mencapai 5,30% per tahun selama periode 2011–2025, dengan angka tertinggi sekitar 6,97% pada tahun 2011–2012 dan sempat berkontraksi menjadi 2,65% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, sebelum kembali menguat menjadi 5,4% pada tahun 2025. Pada pertumbuhan yang juga relatif stabil ini juga seharusnya

menjadi modal yang kuat bagi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di wilayah kabupaten Lamongan.

Dan Indeks Pembangunan Manusia di daerah lamongan terus meningkat dari 70,39 poin pada tahun 2011 menjadi 76,81 poin pada tahun 2025 dan bahkan sempat melampaui rata – rata provinsi di jawa timur yang berada di angka 74,25 menurut data BPS Jawa Timur, dan menjadikan di daerah kabupaten lamongan masuk dalam kategori 5 besar di kabupaten / kota dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di daerah Jawa Timur, yang juga mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dan juga kesehatan selama bertahun – tahun, di ketenagakerjaan juga, TPT di daerah Lamongan juga menunjukkan tren yang membaik, dan turun dari 4,4% pada tahun 2011 menjadi 4,29% pada tahun 2025, dan meskipun sempat melonjak ke 7,12% pada tahun 2020 akibat pandemi. Dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka ini mencerminkan semakin baiknya penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor di kabupaten Lamongan.



Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi, IPM, TPT Dan UMK Kabupaten Lamongan

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan, (diolah, 2026)

Dan dengan kondisi Pertumbuhan Ekonomi yang juga stabil, Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang juga menurun, seharusnya kesejahteraan tenaga kerja di daerah lamongan juga ikut meningkat secara signifikan dan berada pada posisi yang baik dibandingkan daerah Kabupaten/ kota lain. UMK kabupaten Lamongan juga mengalami kenaikan yang konsisten dari Rp 900.000 pada tahun 2011 menjadi Rp 3.012.164 pada tahun 2025, naik rata – rata sekitar 9% per tahun. Jika dibandingkan dengan kabupaten / kota lain di Jawa Timur yang angka justru terbilang rendah dan tidak sebanding dengan capaian indikator makroekonomi lamongan yang cukup baik. Dan data BPS Jawa Timur di tahun 2023, UMK Lamongan yang sebesar Rp 2.701.640 yang hanya menempatkannya di peringkat ke – 14 dari 38 kabupaten / kota di Jawa Timur.

Dan hubungan antar variabel – variabel ini menjadi sangat jelas karena Pertumbuhan ekonomi (PDRB), Indeks Pertumbuhan Manusia dan Upah Minimum Kabupaten yang juga bergerak secara searah selama periode 2011 – 2025 yang dimana ketiga indikator ini menunjukkan tren secara naik dengan karakteristik yang seragam, dan khususnya pada fase ekspansi tahun 2011 – 2019 dan pemulihan pasca pandemi di tahun 2021 – 2025.

Dan mekanisme pertumbuhan ekonomi juga menjadi teridentifikasi yang dimana pertumbuhan PDRB meningkatkan produktivitas marginal tenaga kerja, dan memperkuat daya beli regional dan juga mendorong investasi pembangunan Manusia

(IPM), yang juga secara kumulatif dan mendukung penetapan UMK yang menjadi lebih tinggi sesuai dengan ketentuan PP No. 36 Tahun 2021.

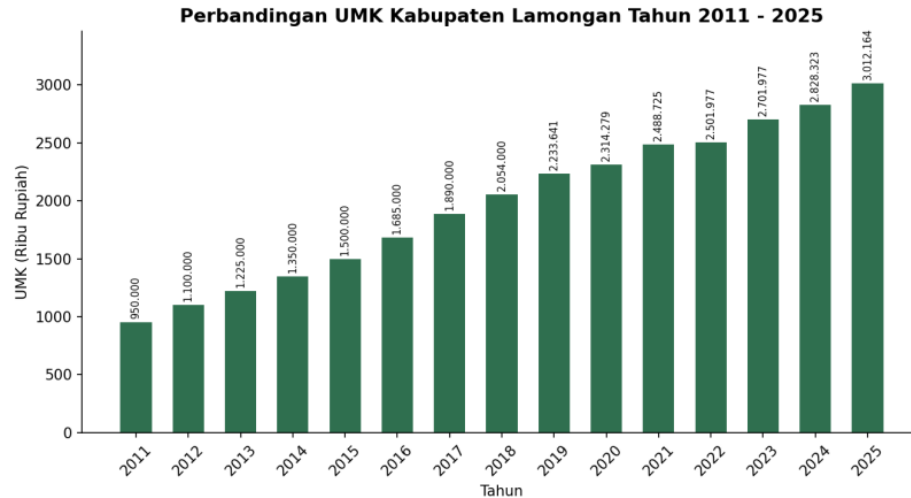
Dan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka dan juga Upah Minimum Kabupaten memiliki korelasi yang juga negatif, yang dimana sesuai dengan Teori Pasar Tenaga Kerja menurut Keynesian, yang dimana penurunan struktural Tingkat Pengangguran Terbuka dari 4,4% menjadi 4,29% yang bergerak berbanding terbalik dengan tren kenaikan Upah Minimum Kabupaten yang juga mencerminkan pengurangan tekanan kelebihan penawaran tenaga kerja yang juga memperkuat posisi tawar pekerja.

Dan kebijakan terhadap implementasi PP No. 36 Tahun 2021 terbukti efektif di wilayah Lamongan, dikarenakan penetapan Upah Minimum Kabupaten yang juga responsif terhadap Indikator makroekonomi yang secara fundamental seperti PDRB, TPT, dan Upah Median BPS.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan juga memiliki ekonomi secara regional agraris yang juga berhasil dalam mencapai keseimbangan antara stabilitas pertumbuhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan juga kesejahteraan pekerja yang juga berkelanjutan selama periode 2011 - 2025.

Disparitas atau bisa dikenal dengan selisih kesenjangan Upah Minimum Kabupaten daerah wilayah Lamongan yang juga relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten daerah lain di Jawa Timur, yang diperlukan untuk analisis disparitas Upah Minimum Kabupaten antar wilayah. Dan berdasarkan data BPS Jawa Timur 2023, yang dimana Lamongan menempati Peringkat 14 dari 38 Kabupaten / kota dengan UMK Rp 2.701.640, yang dimana jauh dari bawah daerah Surabaya yaitu sekitar Rp 3.796.539,

daerah sidoarjo sekitar Rp 3.486.594 dan bahkan kabupaten agraris seperti tuban sekitar Rp 2.794.527 dan Bojonegoro sekitar Rp 2.718.509.



Gambar 1.2

Grafik Perbandingan UMK Daerah Kabupaten Lamongann

***Sumber :** SK Gubernur Jatim 2022 & BPS Jatim 2023 (diolah, 2026)*

Dan dengan Daerah Wilayah Kabupaten Lamongan yang dengan rendahnya UMK sebagai cerminan kesejahteraan tenaga kerja ini semakin mencolok bila dibandingkan dengan Kabupaten Pasuruan. Kedua kabupaten ini memiliki basis ekonomi agraris yang mirip, namun Pasuruan berhasil mencapai UMK yang 9,25% lebih tinggi dari Lamongan berkat keberhasilannya mengembangkan agroindustri yang mampu menyerap sekitar 28% tenaga kerja formal, sementara Lamongan masih sangat bergantung pada penggilingan padi tradisional dengan hanya sekitar 15% tenaga kerja formal (BPS Jawa Timur, 2023). Kondisi ini mencerminkan bahwa potensi ekonomi agraris Lamongan yang sangat besar

belum mampu dikonversi secara optimal menjadi peningkatan kesejahteraan tenaga kerjanya.

Dan persoalan ini diduga berasal dari struktur ketenagakerjaan Lamongan yang masih sangat didominasi sektor informal. Sekitar 62% tenaga kerja di Lamongan merupakan buruh tani musiman dan petani kecil yang tidak terikat oleh ketentuan UMK, sehingga besarnya segmen informal ini menekan keseimbangan upah di sektor formal. Kondisi ini selaras dengan struktur ketenagakerjaan informal yang dominan di suatu wilayah menjadi salah satu faktor yang melemahkan efektivitas pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM dalam mendorong kesejahteraan tenaga kerja secara merata. Dengan kata lain, meskipun PDRB pertanian Lamongan mencapai 28,4% dari total PDRB. Dan dua kali lipat rata – rata nasional juga memanfaatkan ekonomi tersebut dan tidak terserap secara optimal oleh tenaga kerjanya karena sebagian besar juga masih bekerja di luar jangkauan perlindungan upah minimum kabupaten / kota.

Grafik Batang diatas menggambarkan posisi letak daerah wilayah kabupaten lamongan yang berada pada peringkat ke 14 dari 38 kabupaten / kota di jawa timur dengan Upah Minimum Kabupaten sebesar Rp 2,70 juta, yang jauh tertinggal dengan daerah surabaya yang mencapai Rp 3,80 juta yang dimana selisih mencapai 40,7%. Grafik Batang yang berwarna merah untuk daerah surabaya dan lamongan yang secara visual yang menciptakan kontras yang jauh berbeda . dan meskipun daerah lamongan ini memiliki Indeks Pembangunan Manusia sekitar 75,25 yang juga masuk 5 besar di Jawa Timur dan produksi padi. Di daerah Pasuruan memiliki karakter ekonomi yang agraris yang mirip dengan lamongan yang justru berhasil mencapai Rp 2,95 juta atau 9,25% lebih tinggi, dan berkat keberhasilan yang mengembangkan agroindustri beras

dan gula yang menyerap 28% tenaga kerja, dan berbeda dengan daerah lamongan yang masih bergantung pada penggilingan padi tradisional dengan hanya 15% tenaga kerja formal. Daerah Sidoarjo dan Gresik yang menduduki posisi kedua dan juga ketiga dengan masing – masing Rp 3,49 juta dan Rp 3,29 Juta yang jelas mendapatkan keuntungan dari spillover industri manufaktur dan kawasan petrokimia, yang menciptakan efek multiplier yang kuat.

Dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan secara eksplisit mengatur bahwa penetapan UMK harus mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang mencerminkan kondisi ketenagakerjaan daerah. Artinya, secara normatif pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM (IPM), dan kondisi pengangguran (TPT) semestinya memiliki keterkaitan yang nyata dan juga terukur terhadap besaran UMK yang ditetapkan sebagai standar kesejahteraan tenaga kerja. Namun kenyataan di Kabupaten Lamongan memperlihatkan bahwa keterkaitan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan secara teoritis maupun normatif. Hal ini mendorong perlunya kajian yang spesifik dan terukur untuk mengukur seberapa besar dan bagaimana pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, terdapat gap yang jelas dan masih belum adanya kajian yang secara khusus untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan TPT terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan dalam satu variabel untuk menganalisis. Gap ini penting untuk diingat keunikan karakteristik Lamongan sebagai kabupaten agraris dengan IPM tinggi namun kesejahteraan tenaga kerjanya masih relatif tertinggal / rendah, serta pentingnya

validasi terhadap PP Nomor 51 Tahun 2023 di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan"** dengan menggunakan UMK sebagai proksi kesejahteraan tenaga kerja, guna memberikan kontribusi yang bermakna sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan seluruh tenaga kerja di Kabupaten Lamongan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Konteks diatas yang juga dijelaskan diatas, dan dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan tenaga kerja adalah hasil dari interaksi antara berbagai faktor ekonomi dan sosial. Pada pertumbuhan ekonomi di wilayah, kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia, serta kondisi pasar tenaga kerja yang juga mempunyai peran penting dalam mempengaruhi tingkat kesejahteraan pekerja yang juga salah satunya diukur dengan upah minimum kabupaten. Dan oleh karena itu juga diperlukan kajian – kajian empiris untuk menganalisis hubungan pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM dan juga tingkat pengangguran terbuka terhadap kesejahteraan tenaga kerja di wilayah kabupaten lamongan. Dan berdasarkan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh

terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan?

3. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dan juga latar belakang yang telah di uraikan seperti bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan.
2. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan.
3. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kesejahteraan tenaga di Kabupaten Lamongan.

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan juga tingkat pengangguran terbuka terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan yang nantinya diukur dengan UMK di kabupaten tersebut, dan penelitian ini juga dilakukan di wilayah kabupaten lamongan dengan menggunakan data sekunder berupa data time series yang nanti diperoleh dari badan pusat statistik selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2025. Metode analisis yang nanti digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Dan penelitian ini juga tidak membahas faktor lainnya di luar variabel yang telah ditentukan.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan dan ketenagakerjaan, dengan memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan.

1.5.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan penetapan UMK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

b. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pembandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM, dan kesejahteraan tenaga kerja di tingkat daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel atau pendekatan metodologis yang berbeda.